

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: PEMUDA PENGAWAL DEMOKRASI: PENGENALAN *PEACE JOURNALISM* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMPANYE SEHAT KEPADA PEMILIH PEMULA

Denik Iswardani Witarti¹⁾, Anggun Puspitasari²⁾, dan Arin Fithriana³⁾

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur

^{2,3} Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

^{1,2,3} Jl. Ciledug Raya, Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12260

E-mail : denik.iswardani@budiluhur.ac.id¹⁾, anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id²⁾, arin.fithriana@budiluhur.ac.id³⁾

ABSTRAK

Mendekati Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 maupun Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, penyebaran berita palsu atau *hoaks* makin marak terjadi. Sedangkan, agar dapat memilih secara tepat, pemilih memerlukan informasi yang benar serta relevan tentang rekam jejak para kandidat dan program mereka. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu memerangi penyebaran berita palsu tersebut. Cara paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan tidak menyebarkan informasi apa pun sebelum memastikan kebenaran serta kredibilitas sumbernya. Jika masyarakat ingin menyebarkan informasi terkait dengan keunggulan politis calon yang dijunjungnya, masyarakat, khususnya pemilih pemula harus mengerti mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai berita positif jurnalistik yang bersifat damai (*peace journalism*) sehingga dapat menyebarkan berita yang tidak mengandung *hoaks*. Pemilih pemula merupakan bagian penting di dalam sebuah demokrasi. Pemuda di Indonesia harus mampu memegang peran strategis dengan kekuatan kelembagaannya. Pemilih pemula dapat menjadi unit kontrol sosial terhadap suatu demokrasi karena dinilai paling aktif dalam menyebarkan berita melalui media digital mengenai penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu. Dalam upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai *peace journalism* kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, diperlukan sosialisasi mengenai *peace journalism* yang dikemas dalam diskusi interaktif. Salah satu metodenya adalah *workshop* fotografi. Dalam sosialisasi tersebut, pemilih pemula diperkenalkan dengan pentingnya menyebarkan berita dengan baik dan benar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan konten sosial media yang menarik.

Kata Kunci: *Peace Journalism, Pilkada, Anti-hoaks, Fotografi, Demokrasi*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu bahasan penting dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi adalah sebuah gagasan bermasyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan), di mana tidak ada satu pihak pun yang boleh melakukan tindakan politik atas nama rakyat tanpa persetujuan rakyat yang mendelegasikan kekuasaannya (Pavličević, 2019)(Połońska, 2019). Sebagai sebuah gagasan, demokrasi memerlukan prosedur untuk mendelegasikan kekuasaan rakyat atau untuk mendepositkan sejumlah kekuasaan tertentu dari rakyat kepada para pihak yang akan mengatur kepentingan rakyat. Karena banyak dan kompleksnya kepentingan rakyat di sebuah negara, maka prosedur-prosedur demokrasi tersebut sangatlah banyak dan bervariasi. Prosedur-prosedur demokrasi tersebut dituangkan secara tertulis melalui konstitusi beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui prosedur-prosedur inilah praktik berdemokrasi diimplementasikan. Dalam jalannya proses demokrasi tersebut terdapat elemen-

elemen yang menjadi faktor pendukung tolak ukur keberhasilannya, salah satunya adalah pemuda (Ardiansa, 2017).

Terdapat paradigma bahwa pemuda adalah generasi perubahan yang memiliki fitrah sebagai pemberani dan revolusioner yang memiliki karakter khas yang berbeda dengan golongan lainnya. Sehingga pemuda memiliki peran dan kedudukan yang penting baik dalam tatanan bernegara, berbangsa, dan beragama. Sejarah mencatat bahwa perubahan mendasar yang terjadi di sejumlah negara-negara di dunia, sebagian besarnya dilakukan oleh masyarakat dan kaum muda. Perubahan yang dipelopori oleh masyarakat dan pemuda tersebut merupakan wujud dari bersatunya rakyat karena mereka memiliki kepentingan yang sama (*common interest*) yaitu untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Indonesia sebagai negara demokrasi mewujudkan peran pemuda dengan di sahkannya UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Sehingga tampak bahwa pemuda merupakan aspek penyokong negara yang selalu

dipertimbangkan. Sejarah memberikan ruan pengakuan bahwasanya peran pemuda dan masyarakat tidak lepas dari kehidupan bernegara (Raha, 2019). Hal ini kemudian menjadi acuan bahwa pemuda dan masyarakat seharusnya turut berperan dalam tataran mewujudkan demokrasi lokal. Otonomi daerah salah satu peluang guna mengembalikan serta mewujudkan pemuda yang sadar akan posisi dan perannya sebagai *agent of balance* dalam tataran pemerintahan terkecil (Sebastian and Arifianto, 2020).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk dan tolok ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara. Berbeda dengan kebanyakan negara-negara Timur Tengah, Indonesia adalah salah satu penganut demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Jika sebelumnya pemilu hanya memilih para wakil rakyat di badan legislatif, maka berdasarkan amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung. Kemudian pada tahun 2007, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Sebastian dan Arifianto, 2020).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengesahkan dua undang-undang terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Dua undang-undang (UU) itu yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 Maret 2015. Sebelumnya, kedua UU tersebut telah disetujui secara aklamasi oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Purwanto, Zuiderwijk and Janssen, 2018).

Namun, pada pemilihan umum yang telah dilakukan tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginfokan bahwa peredaran *hoax* (berita palsu) meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menghimbau dan mengingatkan akan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk. Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain (Nugroho, 2015).

Pada tren yang terlihat dalam pemilu 2019, isu politisasi identitas menjadi sangat khas dari pola-pola yang dipakai untuk berkampanye. Secara berulang-ulang publik dipaksa untuk mempunyai imajinasi mengenai

segala sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak relevan. Isu mengenai PKI misalnya, sebenarnya sudah menjadi isu usang kemudian diangkat kembali. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata berita *hoaks* dan berita yang berisi ujaran kebencian dalam sehari mencapai 3.500. Segenap *elemen* bangsa tidak boleh memandang remeh berita-berita bohong (*hoax*) karena sesungguhnya info tidak benar sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa. *Hoax* harus disikapi secara serius dan bersama-sama seluruh bangsa mengikisnya. Menyikapi hal ini, dibutuhkan kontrol sosial dari seluruh elemen masyarakat untuk secara cerdas menyikapi isu-isu disintegrasi yang berlawanan dengan kampanye sehat (Sirait, 2019).

Dalam proses demokrasi yang berlangsung, keterlibatan masyarakat dan pemuda sebagai aset perjuangan bangsa dan sebagai pilar kekuatan transformasi ideologi kebangsaan akan memainkan peran dan partisipasi politik secara nyata. Oleh karena itu diperlukan kesadaran politik bersama baik ditingkat elit politik nasional maupun elit politik didaerah sebagai pelaku kebijakan politik, agar tercipta sistem sosial yang akan memicu pola perjuangan fisik serta mengoptimalkan potensi masyarakat dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa dalam mengawal jalannya proses demokrasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemuda sebagai bagian penting di dalam sebuah demokrasi. Pemuda sebagai kontrol sosial terhadap suatu demokrasi. Pemuda di Indonesia harus mampu memegang peran strategis dengan kekuatan kelembagaannya yang ada dalam rangka memaknai nilai-nilai ideologi perjuangan berdasarkan nilai-nilai idealisme kebangsaan yang terinspirasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Generasi pemuda adalah generasi produktif yang aktivitasnya harus diarahkan sedemikian rupa agar bisa bermanfaat bagi negara. Sudah saatnya pemuda untuk berperan aktif dalam berbagai sendi kehidupan negara sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Salah satu wujud peran aktif pemuda bisa diterapkan dalam partisipasi publik, salah satunya adalah dengan mempromosikan kampanye-kampanye sehat ke dalam masyarakat sehingga kaum pemuda dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) (Prihatini, 2018). Dalam hal ini akan ditekankan fungsi masyarakat urban sebagai agen perubahan untuk menciptakan iklim demokrasi masyarakat yang baik dan benar.

Dalam implementasinya, upaya mempersiapkan masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada harus dengan pendekatan yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan fotografi jurnalistik dalam rangka mengimplementasikan jurnalistik damai (*peace journalism*) untuk meningkatkan minat masyarakat urban yang dalam kesehariannya dekat dengan berbagai media sosial sebagai salah satu media

utama untuk mengkomunikasikan isu-isu menjelang pemilu dan Pilkada.

2. RUANG LINGKUP

Kajian ini dibatasi pada lingkup pemilih pemula di daerah Jakarta Selatan. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapa pun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, sering kali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari *handphone*, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, *twitter*, *facebook*, *linked in*, dan sebagainya (Sirait, 2019).

Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini

adalah calon tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (*exist*) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu.

Kegiatan sosialisasi *peace journalism* dilakukan di wilayah hunian urban di daerah Jakarta Selatan. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, peserta dibatasi sebanyak 20 (dua puluh) orang.

3. BAHAN DAN METODE

Metode yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah *Focus Grup Discussion* (FGD) dan Pelatihan. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi sering kali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. *Layout* yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Metode ini merupakan cara yang bagus untuk mendorong partisipasi peserta mengeluarkan pendapatnya mengenai isu-isu tertentu. Kelompok diskusi terdiri dari 15-20 peserta dan akan dipandu oleh seorang moderator (atau fasilitator grup) yang mengenalkan topik bahasan, dalam hal ini adalah pendapat pemuda mengenai keterlibatannya dalam mengawal jalannya *roses* demokrasi. Sebagai persiapan FGD, ditentukan beberapa pertanyaan kunci untuk didiskusikan. Para peserta bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Perbedaan pendapat para peserta dapat memperdalam topik bahasan dalam diskusi. Dalam kegiatan ini, pertanyaan yang dikembangkan antara lain;

1. Nilai-nilai apa saja yang menjadi asas demokrasi?
2. Apakah pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi?
3. Bagaimana cara berkampanye yang sehat dan damai?

Metode yang kedua adalah pelatihan fotografi jurnalistik. Dalam membuat sebuah dokumentasi yang baik, maka diperlukan pemahaman etika dan konsep jurnalistik yang tepat sehingga momen penting yang terjadi pada sebuah kegiatan dapat tersampaikan dengan utuh meskipun hanya melalui sebuah gambar. Teknik dokumentasi tersebut juga akan semakin lengkap apabila dilengkapi dengan kemampuan pengolahan gambar/*editing* sehingga gambar yang dihasilkan tidak hanya merekam kegiatan saja, namun juga memiliki nilai

seni dan mampu menyampaikan berbagai pesan yang tersirat kepada semua orang.

Pelatihan ini membahas mengenai Fotografi Jurnalistik. Sehingga diharapkan peserta pelatihan mampu menguasai dasar Fotografi, Komposisi Foto & Teknik Memotret, mampu memahami konseptualisasi fotografi jurnalistik, mampu memenuhi kebutuhan penyampaian pesan/informasi melalui fotografi, mampu memahami konteks produksi foto dalam kerangka alat komunikasi, mampu mengaplikasikan pemilihan dan pembingkai foto, mampu melakukan *editing* hasil fotografi yang dibuat sendiri serta peserta mampu menyerap aneka pengalaman dan kiat jitu menghasilkan foto layak *posting*. Pelatihan ini akan dipandu oleh mahasiswa Magister Komunikasi yang telah menguasai teknik fotografi dan *broadcasting* yang baik. Berikut adalah ringkasan materi pelatihan Fotografi Jurnalistik:

1. Pengenalan dasar-dasar fotografi
2. Pengenalan kamera dan penggunaannya
3. Teknik fotografi dan memahami foto yang baik
4. Teknik memotret dasar
5. Pengenalan fotografi jurnalistik dan etika jurnalistik
6. Teknik membangun konsep fotografi jurnalistik
7. Teknik *editing* dan mengemas foto jurnalistik
8. Praktik

4. PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang di mana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Warga negara Indonesia berhak memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebagai bukti negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan politik untuk ikut serta mempengaruhi keputusan pemerintahan dan ikut serta memilih wakil-wakil rakyat di kursi pemerintahan. Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Tiap pelaksanaan pemilu pasti akan terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak mereka hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan banyak pemilih pemula yang belum mengerti akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilu dan apa saja hak warga negara dalam pemerintahan terlebih dalam hak politik warga negara yang mereka miliki. Para pemilih pemula ini juga kurang merespons akan berita-berita tentang

politik khususnya tentang pemilihan umum yang akan mereka ikuti sebagai salah satu hak politik warga negara yang mereka miliki.

Memperkenalkan hak politik warga negara terhadap para pemilih pemula atau pelajar ini perlu ada media sebagai penunjang untuk memperkenalkan hak politik itu sendiri kepada para pemilih pemula. Pemerintah mengantisipasi ketidaktahuan para pemilih pemula terhadap hak politik mereka dengan memberikan pendidikan pengetahuan hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu perlu adanya penanaman ilmu tentang hak dan kewajiban politik kepada mereka, karena kebanyakan pemilih pemula itu adalah pemula yang rata-rata memiliki pendidikan.

Pada saat kegiatan berlangsung, suasana sangat kondusif dengan didukung dengan berbagai bantuan teknis yang disediakan oleh pihak Apartment Gateway. Kegiatan dilaksanakan pukul 09:00 pagi sampai 13:30 siang pada selasar utama dan disajikan dengan suasana santai beralaskan karpet. Metode ini dilakukan relasi kedekatan antar peserta dan pelaksana terjalin dengan baik.

Pada penyampaian materi Tim PKM dibagi menjadi 2, Ibu Denik Iswardani dan Ibu Anggun Puspitasari bertugas untuk memberikan pengertian dan sosialisasi mengenai pentingnya melaksanakan *peace journalism* menjelang Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada bulan April. Bapak Yousef dan 2 mahasiswa Prodi Magister Komunikasi bertugas untuk memberikan workshop mengenai fotografi jurnalistik.

Dapat dilihat pada gambar 1, Ibu Denik Iswardani mengemukakan bahwa dengan maraknya *black campaign* di sosial media, masyarakat harus semakin selektif dalam membaca maupun mem-*posting* berita dalam sosial media pribadinya. Tim dosen memberikan contoh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh berita *hoaks*. Selain itu juga tim dosen memberikan contoh konten-konten positif yang dapat dijadikan acuan dalam mem-*posting* berita di sosial media.



Gambar 1. Tim PKM Budi Luhur memberikan pengetahuan mengenai *Peace Journalism*

Setelah sesi sosialisasi berakhir, dapat dilihat pada gambar 2, tim dosen 2 memberikan *workshop* mengenai Tips dan Trik untuk memotret dengan *smartphone*. *Workshop* ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktik fotografi yang berupa persiapan konten, *lighting* hingga *caption* dan tagar positif untuk di *posting* ke dalam akun sosial media masing-masing peserta. Pada tahap awal Tim PKM memaparkan mengenai tips dan trik untuk memaksimalkan penggunaan fitur fotografi yang telah tersedia pada masing-masing *smartphone* peserta, seperti HR, Zoom, *brightness*, text, dan lain-lain agar foto tampak lebih menarik dan *presentable*.



Gambar 2. Tim PKM memberikan *workshop* Tips dan Trik

Tim dosen mengemukakan tagar-tagar positif yang dapat dimuat dalam *caption sosial media*. Tim dosen juga mengemukakan bahwa *caption* yang baik adalah *caption* yang tidak memuat berita opini yang mengacu pada kebohongan dan ajakan perpecahan. Tim dosen juga memberikan tips mengenai cara mudah untuk mendapatkan *like* dan *comment* dengan mem-*posting* konten pada jam-jam tertentu. Dalam *workshop* ini tidak dibutuhkan kamera DSLR untuk membuat foto yang menarik dengan berbagai konten positif.

Hal ini memancing antusiasme peserta yang merupakan masyarakat urban yang dalam kesehariannya dekat dengan sosial media. Tim dosen mengarahkan bahwa tips dan trik ini juga dapat digunakan dalam mem-*posting* hal-hal yang berbau bisnis dan usaha para peserta *workshop*. Dapat dilihat pada gambar 3 dan 4, setelah memberikan materi tim dosen memperagakan cara memegang alat fotografi seperti kamera dan *smartphone* agar gambar yang dihasilkan stabil dan *focus*.



Gambar 3. Tim PKM memperagakan contoh sikap memotret



Gambar 4. Praktik dengan menggunakan media cangkir kopi

Setelah semua materi diberikan, para peserta mempraktikkan tips dan trik tersebut dengan menggunakan kamera HP masing-masing. Antusiasme peserta sangat besar sehingga acara diperpanjang 2 jam dari jadwal yang sudah ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat dikatakan beragam dan positif mengenai sosialisasi dan mini *workshop* yang diberikan. Dapat dilihat pada gambar 5, para peserta yang umumnya tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menyebarkan konten-konten positif dalam sosial media terkait pemilu kini mendapatkan pengetahuan politik dasar yang memadai, sehingga *posting-an* sosial media peserta diharapkan menjadi representasi konten positif yang dapat ditiru masyarakat urban lainnya.



Gambar 5. Praktik *posting* sosial media dengan menggunakan *caption* yang bernada positif

Setelah praktik dilaksanakan, tim dosen menilai konten-konten dan teknik fotografi bersama dan diakhiri dengan sambutan penutup dan makan siang bersama.

5. KESIMPULAN

Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat, proses demokrasi dipastikan akan mengalami hambatan serius yang bisa mengancam masa depan bangsa. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam mengawal demokrasi di Indonesia, dalam pola pemerintahan yang ada saat ini cenderung pemimpin pemerintahan digerakkan oleh sistem kepartaian yang menyebabkan banyaknya kasus kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas peran masyarakat dalam proses perubahan suatu bangsa. Bukan hanya sejarah bangsa modern namun bangsa-bangsa atau kaum terdahulu pun tidak terlepas dari kontribusi masyarakat di dalamnya.

Namun dalam perkembangannya peran masyarakat mengalami kemunduran yang signifikan, pada era globalisasi masyarakat dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lebih beragam sehingga perhatian terhadap nilai-nilai demokrasi lambat laun memudar. Diperlukan peran dari masyarakat khususnya kaum intelektual seperti akademisi universitas untuk kembali menanamkan nilai-nilai demokrasi serta hak dan kewajibannya. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui peran dan kewajibannya jika ingin terlibat dalam salah satu proses demokrasi, antara lain pemilu dan Pilkada. Dengan adanya keterlibatan tim Universitas Budi Luhur, diharapkan masyarakat Gateway Pesanggrahan dapat *terfasilitasi* dengan baik sehingga pengetahuan mengenai nilai-nilai kebangsaan dalam demokrasi dapat berkembang dengan lebih baik.

6. SARAN

Pemilih pemula di Indonesia memiliki kontribusi besar bagi stabilitas politik di negara ini tepatnya dalam Pilkada dan pemilu, namun tidak sedikit pemilih pemula yang kebingungan atau dilema antara apa yang harus

dilakukan atau tidak dilakukannya, termasuk dengan penyebaran informasi-informasi palsu. Dibutuhkan peran dari semua pihak untuk membangun kerja sama termasuk pemilih pemula dalam menyukseskan Pilkada, pemilih pemula ini kerap menjadi target dari peserta pemilu dan juga partai politik. Dengan pengetahuan tersebut pemilih pemula akan menjadi cahaya dari politik di Indonesia, karena adanya kesadaran diri untuk membentuk politik Indonesia yang baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, D. (2017) 'Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia', *Jurnal Politik*. doi: 10.7454/jp.v2i1.82.
- Nugroho, H. (2015) 'Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. doi: 10.22146/jps.v1i1.23419.
- Pavličević, D. (2019). *Public Participation and State Building in China: Case Studies from Zhejiang*. Routledge.
- Polońska, E., & Beckett, C. (Eds.). (2019). *Public service broadcasting and media systems in troubled european democracies*. Springer.
- Prihatini, E. S. (2018) 'Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament', *Women's Studies International Forum*. doi: 10.1016/j.wsif.2018.07.015.
- Purwanto, A., Zuiderwijk, A. and Janssen, M. (2018) 'Citizen engagement in an open election data initiative: A case study of Indonesian's "Kawal Pemilu"', in *ACM International Conference Proceeding Series*. doi: 10.1145/3209281.3209305.
- Raha, S. (2019) 'Demokrasi Pancasila', *Academia*.
- Sebastian, L. C. and Arifianto, A. R. (2020) 'Introduction', in *The 2018 and 2019 Indonesian Elections*. doi: 10.4324/9781003031000-1.
- Sirait, F. E. T. (2019) 'Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia)', *jurnal Penelitian Politik (LIPI)*.